

ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

(Potential Analysis of the Community Forest Development in Central Lombok Regency)

Hendra Setiawan¹, Baba Barus², dan Suwardi²

¹Program Magister Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL), Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

²Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Jl. Meranti, Kampus IPB Wing 12 Level 5 Darmaga Bogor 16680

E-mail: s_wan71@yahoo.com

Diterima (received): 20 November 2013; Direvisi (revised): 17 Februari 2014; Disetujui untuk dipublikasikan (accepted): 3 Maret 2014

ABSTRAK

Kawasan hutan Kabupaten Lombok Tengah saat ini tidak bisa memproduksi hasil hutan kayu karena kondisi vegetasi hutan kurang optimal sehingga terjadi defisit kebutuhan kayu di wilayah ini. Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan kayu adalah melalui produksi hutan rakyat. Saat ini produksi hutan rakyat masih rendah tetapi berpotensi besar, untuk itu dibutuhkan perencanaan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendapatkan jenis tanaman yang potensial berdasarkan referensi masyarakat dan identifikasi tingkat kelayakan dari pengusaha hutan rakyat; (2) memetakan kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan rakyat; (3) mendapatkan potensi ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Tengah; dan (4) menyusun arahan pengembangan hutan rakyat. Analisis data pada penelitian ini mencakup analisis data spasial berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG), analisis finansial, identifikasi jenis tanaman hutan rakyat prioritas menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan lahan yang dialokasikan untuk hutan rakyat di Kabupaten Lombok Tengah yang sesuai dan tersedia untuk sengon yaitu seluas 2.552,2 ha, mahoni seluas 4.363,7 ha dan jati seluas 8.825,8 ha. Analisis finansial menunjukkan bahwa pengusaha hutan rakyat layak untuk dikembangkan terlihat dari nilai NPV, BCR, dan IRR yang memenuhi kriteria layak walaupun pada tingkat suku bunga yang berbeda. Arahan jenis tanaman hutan rakyat yaitu, pada bagian utara untuk sengon (*Paraserianthes falcata*) dan mahoni (*Swietenia mahogany*) sedangkan di bagian selatan untuk jati (*Tectona grandis*). Lokasi arahan pengembangan terdapat di 8 kecamatan prioritas yaitu Pujut, Praya Barat, Batukliang, Praya Barat Daya, Batukliang Utara, Kopang, Praya Timur, dan Pringgarata. Saat ini posisi tawar petani masih rendah sehingga harga kayu dari hutan rakyat dikuasai oleh pengumpul/pedagang kayu, karena pola pengembangan dan kelembagaan kelompok tani belum terkoordinasi secara baik. Pola pengembangan kemitraan yang berbasis koperasi merupakan solusi yang tepat.

Kata Kunci: hutan rakyat, pengembangan hutan rakyat, prioritas pengembangan

ABSTRACT

Currently, Central Lombok forest area is unable to produce timber because the forest vegetation is not in optimum condition, and resulted to the lack of wood products. Development of community forest is an alternative to meet the need for timber. Although the timber production derives from the community forest is still low, it is actually potential. Therefore, a good planning is required to boost the production. The objectives of this study were: (1) to obtain an excellent potential of plant types based on the community reference and identify the community forest feasibility level in terms of economic value; (2) to map potential land availability for developing community forest; (3) to assess the potential of land availability used to developed the community; and (4) to formulate the direction of community forest development. The data analyses covered in this research include spatial analyses based on Geographic Information System (GIS), financial analysis, plant type identification of the community forest priority, and conducting an Analytical Hierarchy Process (AHP). The results shows that the land allocated for the community forest in Central Lombok was suitable and available for growing sengon (*Paraserianthes falcata*) (2,552.2 ha), mahogany (*Swietenia mahogany*) (4,363.7 ha), and teak (*Tectona grandis*) (8,825.8 ha). The financial analysis showed that community forest business was feasible to be developed based on the values of NPV, BCR, and IRR that met the feasibility criteria in spite of the different interest rates. The northern part of the community forest was suggested to grow sengon and mahogany while the southern part was recommended to grow teak. The recommended locations for developing the community forests consist of eight sub-districts, namely Pujut, Praya Barat, Batukliang, Praya Tenggara, Batukliang Utara, Kopang, Praya Timur and Pringgarata. The farmer's bargaining position is apparently low so that the pricing of forest products has been controlled by the timber collectors/traders. This is due to the patterns of institutional development and farmer groups that exist today are not well coordinated. Therefore, developing a pattern of a cooperative-based partnership would be a right solution.

Keywords: community forest, community forest development, development priority

PENDAHULUAN

Gangguan terhadap sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia telah menyebabkan kawasan hutan kurang mampu lagi memberikan manfaat yang optimal, mengalami kerusakan, dan menurunnya produktivitas. Hal ini menyebabkan hutan alam kurang mampu lagi menjadi pemasok kayu untuk bahan baku industri perkayuan. Kebutuhan bahan baku kayu di Kabupaten Lombok Tengah saat ini sebesar 43.444,5 m³/tahun, sedangkan produksi kayu dari hutan alam selama ini tidak ada dan dari hutan rakyat saat ini hanya menghasilkan kayu 1.981 m³/tahun. Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan kayu tersebut adalah hutan rakyat. Pengembangan hutan rakyat haruslah memberikan kontribusi yang berarti dalam penyediaan bahan baku kayu.

Hal ini juga senada dengan Darusman & Hardjanto (2006) bahwa ada keyakinan bahwa hutan rakyat menyimpan potensi yang sangat berarti dalam pencatatan pengelolaan hutan nasional. Manfaat dari pengembangan hutan rakyat juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat di pedesaan (Attar, 2000). Dimana potensi pengembangan hutan rakyat di Jawa seluas 2,7 juta ha dengan potensi produksi sampai 16 juta m³ (Aldianoverti, 2012).

Kecenderungan kepemilikan hutan milik (rakyat) juga meningkat di Amerika Serikat. Menurut Sampson & DeCoster (1997) bahwa masyarakat Amerika cenderung memiliki hutan milik dan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Hal ini terjadi karena potensi yang dimiliki oleh hutan milik (rakyat) cukup besar. Kabupaten Lombok Tengah memiliki lahan tidak produktif cukup luas yaitu sekitar 8.356,06 ha (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Tengah, 2011), diantaranya terdapat pada lahan-lahan milik masyarakat yaitu sekitar 4.871,47 ha. Lahan-lahan tidak produktif tersebut kemungkinan berpotensi untuk pengembangan hutan rakyat. Permasalahannya adalah belum tersedia data yang memadai terutama pada wilayah yang berpotensi untuk pengembangan hutan rakyat. Dari beberapa alasan tersebut pengembangan dan pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Tengah menjadi penting. Perencanaan yang baik dan data yang memadai dibutuhkan agar pengembangan hutan rakyat dapat berjalan secara optimal, baik dari fungsi ekonomi maupun fungsi ekologi.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendapatkan jenis tanaman yang berpotensi berdasarkan referensi masyarakat dan identifikasi tingkat kelayakan pengusahaan hutan rakyat; (2) Memetakan potensi kesesuaian lahan dalam pengembangan hutan rakyat; (3) Mendapatkan potensi ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Tengah; dan (4) Menyusun arahan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Lombok Tengah.

METODE

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah pada April - Oktober 2013. Data sekunder yang diperlukan meliputi: (1) Data Produksi Hutan Rakyat Tahun 2011; (2) Data Biaya dan Pendapatan Pengusahaan Hutan Rakyat Tahun 2012, (3) Satuan Peta Tanah (BBPPSLP Tahun 2011), (4) Peta Curah Hujan (BAPPEDA); dan (5) Peta Pola Ruang Kabupaten (BAPPEDA) (Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2011). Data primer dari wawancara terhadap beberapa responden. Alat analisis yaitu *software* pengolah data (Excel dan SANNA) serta *software* pengolah peta (ArcView/ArcGIS). Metode analisis data yang digunakan dijelaskan pada beberapa bagian berikut.

Identifikasi Jenis Tanaman Prioritas

Potensi jenis tanaman prioritas yang akan dikembangkan dilihat dari data produksi hutan rakyat dan preferensi masyarakat. Data produksi kayu rakyat Lombok Tengah (tahun 2007 – 2011), studi literatur jenis kayu potensial dan wawancara responden, preferensi petani mengenai jenis komoditas yang ingin ditanam serta *stakeholders* lain, jenis tanaman yang akan memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial bagi suatu wilayah.

Kriteria pemilihan jenis tanaman hutan rakyat adalah: (1) kecepatan tumbuh; (2) harga jual; (3) kemudahan pemasaran; (4) kemudahan penanaman dan pemeliharaan; (5) kesesuaian agroklimat; dan (6) manfaat ekologi.

Data tersebut kemudian diolah dengan memberikan skor terhadap berbagai jenis tanaman kehutanan yang banyak diminati. Skor 1 adalah untuk tanaman yang disukai sedangkan skor 0 adalah untuk yang tidak disukai. Total skor tertinggi menentukan jenis tanaman kehutanan yang paling disukai untuk dikembangkan.

Analisis Finansial Kelayakan Pengusahaan Hutan Rakyat

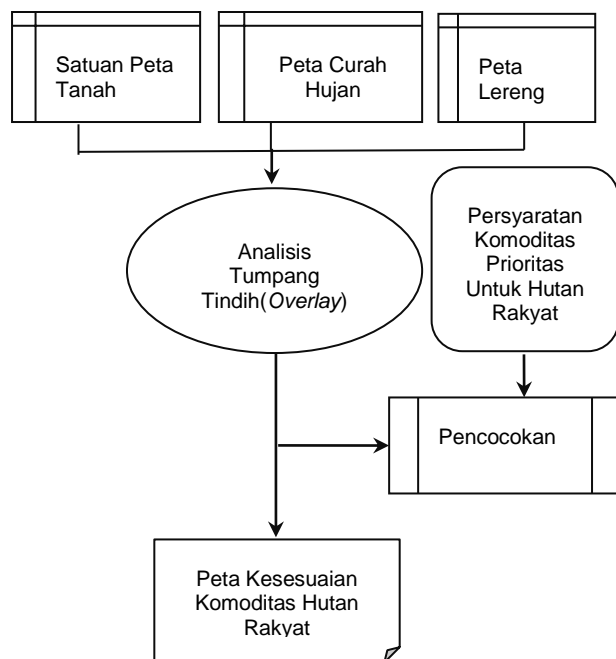
Analisis finansial digunakan untuk mengetahui pengusahaan hutan rakyat, dimana instrumen ini akan membantu petani untuk memilih komposisi jenis yang sebaiknya dikembangkan dan menentukan daur yang paling menguntungkan melalui berbagai pilihan (Rachman dkk., 2007). Analisis finansial yang digunakan sebagai berikut :

1. *Net Present Value* (NPV), digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari laba suatu investasi tersebut yang memberi keuntungan atau bahkan sebaliknya (Rustiadi dkk., 2009).
2. *Internal Rate of Return* (IRR), menghitung tingkat bunga pada saat arus kas sama dengan nol atau pada saat laba (pendapatan dikurangi laba) yang telah di-*discount factor* sama dengan nol.

3. *Benefit Cost Ratio* (BCR) atau *Gross B/C*, adalah rasio dari pendapatan ($B=Benefit$) dibandingkan dengan biaya ($C=Cost$) yang dihitung nilai sekarang (faktor telah diberi pengurangan).

Identifikasi Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Hutan Rakyat

Analisis kesesuaian lahan dilakukan menggunakan metode FAO (1976) dengan cara membandingkan antara karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh komoditas tanaman hutan rakyat. Diagram alir penentuan kesesuaian lahan untuk komoditas hutan rakyat terpilih disajikan pada **Gambar 1**.



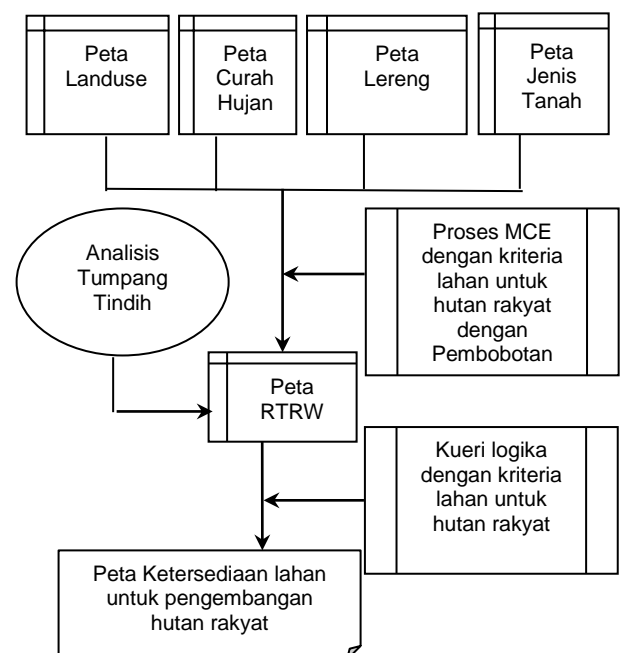
Gambar 1. Diagram alir penentuan kesesuaian lahan untuk komoditas hutan rakyat terpilih.

Identifikasi Ketersediaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Rakyat

Analisis ketersediaan lahan hutan rakyat ini dilakukan dengan metode *Multi-Criteria Evaluation* (MCE). Tujuan MCE memberi petunjuk pada pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang adil/objektif (Chakkar & Mousseau, 2007). Metode MCE telah digunakan sebagai teknik pemodelan kartografi yang menyediakan sebuah pilihan alternatif dasar untuk mengevaluasi sejumlah alternatif pilihan yang terdapat di suatu lapangan dengan banyak kriteria (Store & Jokimaki, 2003). Kriteria yang digunakan untuk ketersediaan lahan untuk hutan rakyat tersebut antara lain adalah peta curah hujan, peta lereng, peta jenis tanah, dan peta penggunaan lahan. Kriteria yang digunakan didasarkan pada pendekatan dengan metode *Weighted Linear Combination* (WLC).

Metode WLC mengasumsikan bahwa bobot setiap faktor tidak sama. Pada penelitian ini bobot faktor ditentukan dengan metode AHP yang diperkenalkan oleh Saaty (1994). AHP adalah metode untuk mengukur derajat kepentingan antar faktor dengan meminta pendapat ahli. Ukuran kepentingan antar-faktor/subfaktor diberi bobot dengan selang dari 1 – 9

Peta ketersediaan lahan kemudian ditumpangtindihkan dengan peta RTRW kabupaten, dengan menggunakan *software* GIS. Hasil analisis adalah luas areal lahan per kecamatan yang potensial untuk dikembangkan budidaya hutan rakyat. Selanjutnya dengan memperhatikan faktor-faktor pada pola ruang kabupaten, maka diperoleh peta ketersediaan dari lahan yang sesuai untuk pengembangan hutan rakyat, seperti yang terlihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Diagram alir analisis ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan rakyat.

Pola Pengembangan Hutan Rakyat Prioritas Menurut Stakeholders

Penentuan prioritas pola pengembangan hutan rakyat dilakukan dengan metode AHP. Struktur hirarki masalah yang dibangun berdasarkan studi literatur serta informasi yang didapat dari wawancara responden ahli yang terkait dengan kegiatan hutan rakyat.

Arahan Pengembangan Hutan Rakyat

Arahan Berdasarkan Jenis

Pendekatan *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) digunakan ketika ada perbedaan pilihan-pilihan yang tidak dapat dievaluasi dengan pendugaan sederhana atau dengan satu dimensi (Postorino & Pratico, 2012). TOPSIS (*Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution*)

menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak *Euclidian* (Zhang, 2011). MCDM TOPSIS digunakan untuk menentukan pilihan prioritas dari suatu lahan yang mempunyai dua atau lebih jenis tanaman hutan rakyat. Arahan untuk jenis didasarkan atas hasil analisis kesesuaian lahan dan ketersediaan lahan hutan rakyat yang kemudian ditumpangtindihkan dengan peta RTRW sehingga didapatkan lahan yang sesuai dan tersedia berdasarkan pola ruang yang ada. Kriteria yang digunakan adalah; (1) kelas kesesuaian lahan; (2) potensi produksi kayu; (3) luas kesesuaian lahan; (4) potensi lahan tersedia berdasarkan RTRW; (5) tingkat analisis finansial; (6) preferensi masyarakat; dan (7) daur tebang untuk jenis tanaman.

Arahan Berdasarkan Lokasi

Dari kesesuaian dan ketersediaan lahan hutan berdasarkan RTRW didapat wilayah yang sesuai dan tersedia. Penentuan wilayah yang menjadi prioritas pengembangan hutan rakyat menggunakan pendekatan MCDM-TOPSIS. Dengan menggunakan kriteria potensi volume hutan rakyat per kecamatan, potensi lahan hutan rakyat yang sesuai dan tersedia, luas wilayah dan jumlah penduduk per kecamatan, serta kebutuhan kayu per kapita.

Arahan Berdasarkan Kelembagaan

Untuk menentukan arahan kelembagaan berdasarkan hasil analisis dari praktik pemasaran kayu rakyat, pola pengembangan hutan rakyat prioritas menurut *stakeholders* dan pola pengembangan potensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Jenis Tanaman Prioritas untuk Pengembangan Hutan Rakyat

Dalam pembentukan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah menerima usulan dari setiap kelompok tani untuk jenis-jenis bibit yang akan dikembangkan. Berdasarkan usulan tersebut diketahui preferensi masyarakat terhadap jenis

tanaman kayu yang berpotensi dan paling diminati oleh masyarakat untuk ditanam pada masing-masing wilayah. Berdasarkan analisis, sengon, mahoni, dan jati merupakan jenis tanaman yang paling banyak diminati. Untuk daerah Lombok Tengah bagian selatan, masyarakat lebih menyukai jati karena cocok dengan wilayahnya yang kering. Berbeda dengan bagian utara, dimana masyarakat menyukai mahoni dan sengon karena memiliki pertumbuhan yang cepat, sedangkan untuk jenis gmelina dan trembesi lebih banyak ditanam di tipe jalan, pekarangan sebagai tanaman pembatas lahan dan sekaligus untuk tanaman peneduh. Berdasarkan hasil analisis di atas maka ditetapkan tanaman yang potensial untuk dikembangkan adalah jenis sengon, mahoni, dan jati yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial bagi masyarakat.

Tinjauan Finansial Pengembangan Hutan Rakyat

Berdasarkan **Tabel 1**, terdapat tiga tingkat suku bunga mulai dari rentang tahun 2005 sampai dengan 2013 (Bank Indonesia) yaitu yang berlaku pada saat penelitian sebesar 7,25%, pada waktu suku bunga terendah (5,75%) dan saat tertinggi pada level 7,75% (14 Mei 2013). Hal ini dilakukan untuk melihat sensitivitas kelayakan pengusahaan hutan rakyat pada beberapa tingkat suku bunga yang pernah ada.

Berdasarkan hasil analisis untuk hutan rakyat sengon dengan daur tebang 6 tahun memenuhi kriteria kelayakan usaha. Ini dilihat dari nilai NPV yang positif dan B/C Rasio lebih dari satu serta tingkat bunga yang berlaku sekarang masih lebih kecil dari nilai IRR. Analisis kelayakan usaha mahoni dan jati juga menunjukkan bahwa investasi penanaman mahoni dan jati layak untuk diteruskan.

Identifikasi Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Hutan Rakyat

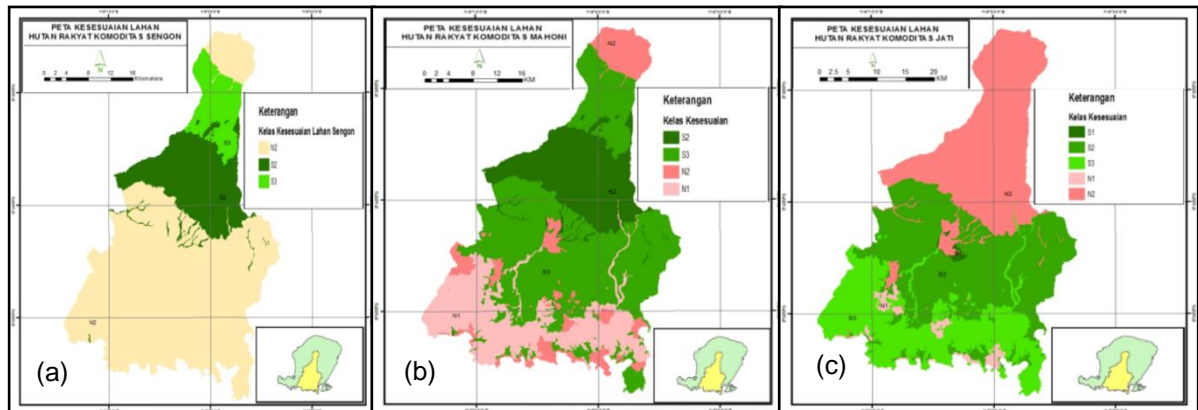
Analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa mahoni memiliki luasan terbesar yaitu 79.640,1 ha dan terkecil sengon dengan luas 32.914,5 ha sebagaimana tertuang dalam **Tabel 2**. Pada **Gambar 3** dapat dilihat penyebaran kesesuaian mahoni lebih merata daripada sengon dan jati. Kesesuaian sengon terpusat di daerah utara sedangkan jati berada di daerah selatan.

Tabel 1. Analisis finansial tanaman sengon, mahoni dan jati per hektar.

No	Tingkat Suku Bunga	Analisis Finansial	Pengusahaan Per Daur Tebang		
			Sengon (6 Tahun)	Mahoni (20 Tahun)	Jati (20 Tahun)
1	7,25% Berlaku Saat Penelitian 8 Oktober 2013	1. NPV (Rp x 1.000) 2. IRR (%) 3. BCR (%)	97,287 95,32 9,13	73,698 21,20 4,86	166,028 26,09 9,42
2	5,75% Terendah 5 April 2006	1. NPV (Rp x 1.000) 2. IRR (%) 3. BCR (%)	105,274 95,32 9,60	97,929 21,20 5,73	218,377 26,09 11,23
3	12,75% Tertinggi 14 Mei 2013	1. NPV (Rp x 1.000) 2. IRR (%) 3. BCR (%)	73,485 95,32 7,63	24,294 21,20 2,61	60,510 26,09 4,86

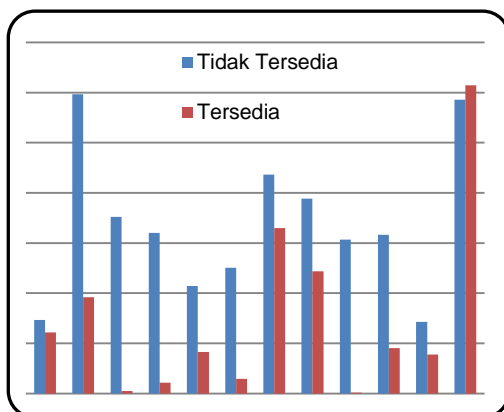
Tabel 2. Lahan kesesuaian jenis tanaman prioritas hutan rakyat di Lombok Tengah.

No.	Kecamatan	Sesuai (ha)		
		Jati	Sengon	Mahoni
1	Batukliang	0,0	5.282,6	5.282,6
2	Batukliang Utara	0,0	10.892,8	10.892,8
3	Janapria	4.861,5	2.238,2	6.716,2
4	Jonggat	5.968,8	868,3	6.837,1
5	Kopang	0,2	5.308,3	5.308,5
6	Praya	2.123,4	2.321,9	4.420,3
7	Praya Barat	14.396,1	34,5	7.420,5
8	Praya Barat Daya	11.600,8	0,0	4.256,9
9	Praya Tengah	4.586,7	1.479,7	6.030,4
10	Praya Timur	8.041,2	82,5	6.900,8
11	Pringgarata	0,1	4.405,8	4.405,8
12	Pujut	22.159,6	0,0	11.168,3
Jumlah		73.738,4	32.914,5	79.640,1

**Gambar 3.** Kesesuaian lahan tanaman hutan rakyat jenis (a) sengon, (b) mahoni, dan (c) jati.

Analisis Ketersediaan Lahan Hutan Rakyat

Lahan yang tersedia untuk pengembangan hutan rakyat prioritas adalah 36.202,4 ha (30,9%) berupa tegalan atau tanah kosong, semak, kebun, dan ladang di luar kawasan hutan, sedangkan lahan yang tidak tersedia untuk pengembangan hutan adalah seluas 81.121,4 ha (69,1%). Pada Gambar 4 terlihat bahwa daerah dengan ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan rakyat prioritas terluas adalah Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya. Daerah tersebut sebagian besar terdiri dari lahan kering dan merupakan lahan kosong dengan karakteristik kurang subur.

**Gambar 4.** Ketersediaan lahan pengembangan hutan rakyat berdasarkan penggunaan lahan aktual.

Perda Kabupaten Lombok Tengah No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031 belum memasukkan hutan rakyat sebagai salah satu rencana pola ruang. Lombok Tengah memiliki potensi lahan untuk dikembangkan sebagai hutan rakyat (Tabel 3 dan Gambar 5), ini merupakan sumber daya yang besar untuk memenuhi kebutuhan hasil hutan yang semakin meningkat dan untuk menjaga keseimbangan iklim mikro serta untuk memperbaiki kualitas lahan kritis.

Tabel 3. Ketersediaan lahan hutan rakyat berdasarkan RTRW.

No.	Kecamatan	Ketersediaan Lahan Pengembangan Hutan Rakyat	
		Tersedia (ha)	Tidak Tersedia (ha)
1	Batukliang	1.370,2	3.994,4
2	Batukliang Utara	221,2	15.543,6
3	Janapria	0,0	7.134,2
4	Jonggat	0,0	6.840,6
5	Kopang	334,0	5.602,9
6	Praya	0,0	5.586,8
7	Praya Barat	3.177,2	12.154,9
8	Praya Barat Daya	1.226,6	11.421,5
7	Praya Barat	3.177,2	12.154,9
8	Praya Barat Daya	1.226,6	11.421,5
9	Praya Tengah	0,0	6.174,6
10	Praya Timur	213,3	7.916,3
11	Pringgarata	110,8	4.297,5
12	Pujut	5.215,9	18.787,4
Jumlah		11.869,1	105.454,7

Berdasarkan hasil wawancara petani dan para pelaku pemasaran, ada beberapa pola saluran pemasaran kayu rakyat di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

1. Petani → tengkulak → usaha pengolahan kayu lokal → konsumen.
2. Petani → tengkulak I → tengkulak II → usaha pengolahan kayu lokal → konsumen (lokal dan luar Lombok Tengah).
3. Petani → tengkulak → usaha pengolahan kayu luar Lombok Tengah → konsumen
4. Petani → tengkulak I → tengkulak II → usaha pengolahan kayu luar Lombok Tengah - konsumen.
5. Petani → usaha pengolahan kayu (Lokal dan Luar) → konsumen
6. Petani → konsumen.

Diantara beberapa pola pemasaran tersebut, yang banyak terjadi di lapangan adalah pola pemasaran dua dan tiga dimana pada pola kedua kayu diolah terlebih dahulu di UPK lokal baik berupa setengah jadi (papan dan balok) maupun barang jadi (kusen, papan, dan mebel). Pada pola ketiga, kayu lebih banyak dijual dalam bentuk kayu bulat (*log*) karena UPK lebih diuntungkan dengan harga kayu yang lebih murah.

Pola pemasaran pertama merupakan pola pemasaran yang paling menguntungkan bagi pengembangan wilayah, karena dalam pola pemasaran ini seluruh nilai tambah (*added value*) berada dalam satu wilayah.

Kelembagaan Hutan Rakyat di Lombok Tengah Praktik Pemasaran Kayu Rakyat Pola Pengembangan Hutan Rakyat

Terdapat tiga pola pengembangan hutan rakyat antara lain :

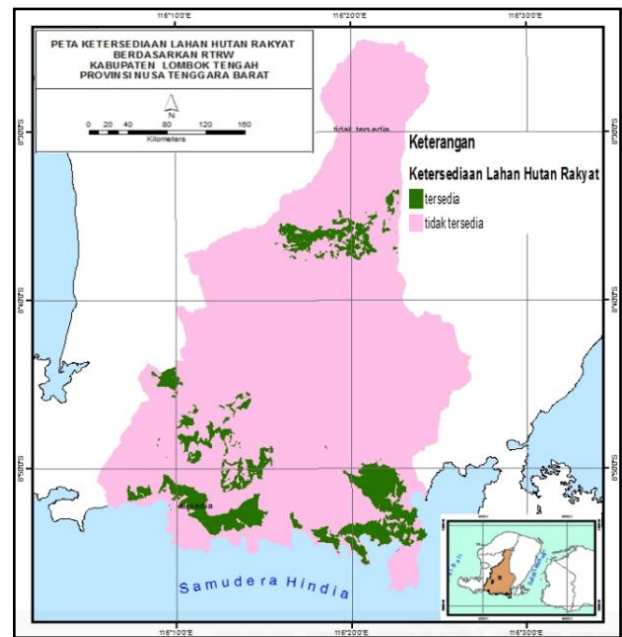
1. Hutan Rakyat Pola Swadaya, yaitu hutan rakyat yang dibangun oleh kelompok atau perorangan dengan kemampuan modal dan tenaga dari kelompok atau perorangan itu sendiri.
2. Hutan Rakyat Pola Subsidi adalah hutan rakyat yang dibangun melalui subsidi atau bantuan pemerintah atau pihak lain yang peduli terhadap pembangunan hutan rakyat.
3. Hutan Rakyat Pola Kemitraan adalah hutan rakyat yang dibangun atas kerjasama masyarakat dan perusahaan swasta dengan insentif permodalan bunga ringan (KUHR/Kredit Usaha Hutan Rakyat).

Pola pengembangan yang selama ini berjalan di Lombok Tengah adalah pola subsidi.

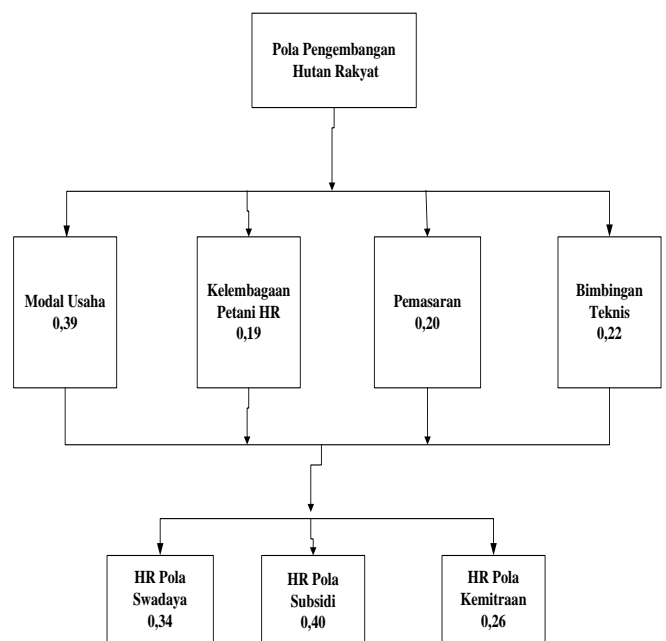
Pola Pengembangan Prioritas Menurut Stakeholders

Dengan metode pembobotan (AHP) terhadap hasil kuisioner maka diperoleh hasil sebagaimana tersaji pada **Gambar 6**. Skor AHP menunjukkan bahwa pola pengembangan hutan rakyat subsidi memiliki peringkat tertinggi yang merupakan

preferensi dari masyarakat untuk pengembangan hutan rakyat di Lombok Tengah.



Gambar 5. Ketersediaan lahan hutan rakyat berdasarkan pola ruang.



Gambar 6. Hasil pembobotan dari kuisioner.

Pola Pengembangan Potensial

Pola pengembangan hutan rakyat dengan pola kemitraan dapat menjadi prioritas. Pola ini memberikan stimulus baik berupa modal maupun bimbingan teknis, dengan harapan petani hutan rakyat dapat berkembang dengan baik sehingga memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Pola kemitraan ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan kredit usaha melalui Petani Kredit Usaha (PKU) berupa pemberian Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) dimana pada tahun 2012 melalui

Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) Kementerian Kehutanan akan mengeluarkan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat (PDB-HR) direncanakan bunga hanya 5,5%. Kelembagaan berbasis koperasi dapat menjadi wadah bagi petani dalam memenuhi kebutuhan baik modal, sarana, dan prasarana hutan rakyat ataupun kredit lunak lainnya.

Arahan Pengembangan Hutan Rakyat

Arahan Berdasarkan Jenis

Penetapan prioritas jenis tanaman dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan analisis kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk hutan rakyat yang dilakukan sebelumnya serta kriteria yang digunakan dalam pemilihan alternatif prioritas jenis tanaman yang dikembangkan. Arahan untuk jenis tanaman hutan yang didapatkan dengan menggunakan metode MCDM-TOPSIS dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Arahan hutan rakyat berdasarkan jenis.

No	Kecamatan	Luas lahan Sesuai dan Tersedia (ha)	Prioritas Jenis Tanaman HR
1	Batukliang	1.370,2	Sengon, Mahoni
2	Batukliang Utara	223,9	Sengon, Mahoni
3	Kopang	503,7	Sengon, Mahoni
4	Praya Barat	3.016,9	Jati, Mahoni
5	Praya Barat Daya	861,6	Jati, Mahoni
6	Praya Timur	213,3	Jati, Mahoni
7	Pringgarata	110,8	Sengon, Mahoni
8	Pujut	4.727,9	Jati, Mahoni

Arahan Berdasarkan Lokasi

Berdasarkan analisis MCDM-TOPSIS maka didapatkan prioritas pengembangan hutan rakyat berdasarkan kecamatan seperti pada **Gambar 7**. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam pengembangan hutan rakyat adalah adanya ketersediaan bibit yang bagus baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada Permenhut No. P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyelenggara KBR disebutkan bahwa setiap desa dapat ditetapkan paling banyak 2 kelompok bibit yang terdapat di areal hutan/lahan yang ditanami yang setara dengan 40 ha. Syarat untuk lokasi pembibitan adalah: (1) topografi relatif datar (kemiringan lereng 0-8%), bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, tersedia sumber air, (2) aksesibilitas baik atau mudah dijangkau. Setiap kelompok pembibitan di luar jawa membuat bibit minimal 25.000 batang.

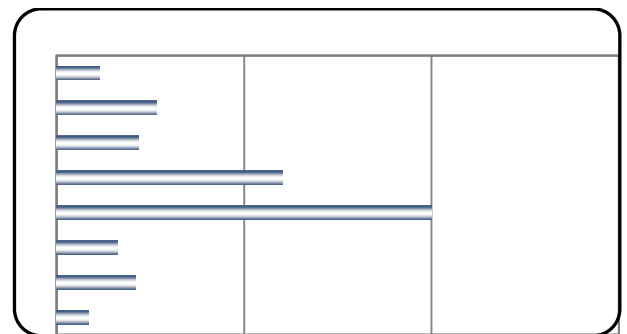
Luas lahan yang sesuai dan tersedia gabungan antar-ketiga jenis tanaman prioritas hutan rakyat seluas 11.028,3 ha berpotensi menghasilkan kayu sebesar 818.848 m³ (diameter 15 cm) akan mampu memenuhi kebutuhan kayu

penduduk Kabupaten Lombok Tengah sebesar 43.444,5 m³/per kapita/tahun.

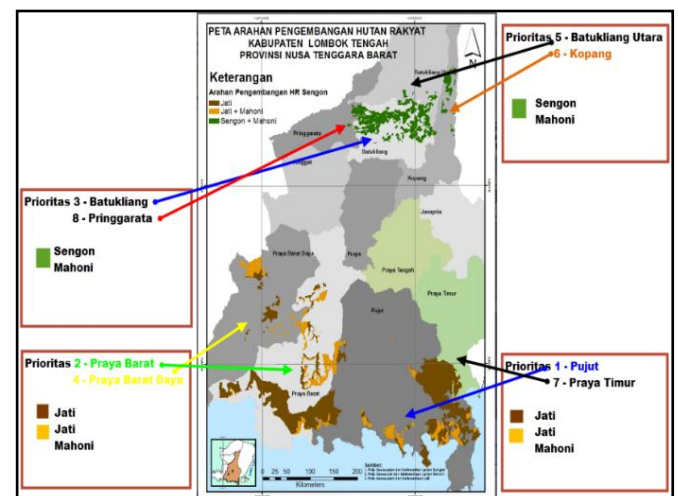
Arahan Berdasarkan Kelembagaan

Salah satu upaya dalam pengembangan hutan rakyat lestari dilaksanakan melalui pola kemitraan. Pola kemitraan dibangun antara petani hutan rakyat dengan pengusaha pengelolaan kayu dimana pemerintah daerah sebagai fasilitator. Petani hutan rakyat yang tergabung dalam suatu lembaga akan lebih mudah dalam mengusahakan pengelolaan hutan rakyat. Lembaga petani hutan rakyat sebagai sebuah organisasi memiliki posisi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan petani secara perorangan.

Program-program kemitraan yang dikembangkan pemerintah dan swasta kebanyakan menghendaki kemitraan dengan petani dalam sebuah kelompok karena memudahkan koordinasi. Hal yang sangat penting dalam pengelolaan hutan rakyat dengan adanya kelembagaan petani adalah partisipasi petani itu sendiri. Berdasarkan arahan jenis dan arahan lokasi maka dapat disusun arahan pengembangan hutan rakyat seperti pada **Gambar 8**.



Gambar 7. Grafik *ranking of alternatives* wilayah pengembangan hutan rakyat per kecamatan (tersedia dengan RTRW) berdasarkan analisis MCDM-TOPSIS



Gambar 8. Arahan pengembangan Hutan Rakyat di Lombok Tengah.

KESIMPULAN

Jenis tanaman hutan rakyat yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Lombok Tengah yaitu sengon, mahoni, dan jati. Dari analisis finansial pada tingkat suku bunga yaitu 5,75%; 7,25%, dan 12,75% dengan daur tebang untuk sengon 6 tahun, mahoni dan jati 20 tahun memiliki kelayakan untuk diusahakan. Luas lahan yang sesuai untuk sengon 32.914,5ha, mahoni 79.640,1 ha, dan jati 73.738,4 ha. Luas lahan yang sesuai dan tersedia berdasarkan RTRW untuk sengon adalah 2.552,2 ha, mahoni seluas 4.363,7 ha, dan untuk jati 8.825,8 ha.

Kemitraan antara pengusaha kayu dengan petani hutan rakyat perlu dikembangkan untuk mendukung pengembangan hutan rakyat yang berkelanjutan di Lombok Tengah. Pola kemitraan ini memerlukan suatu kelembagaan yang bisa menjembatani antara industri dan petani yang berasas koperasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung berjalannya penelitian ini, yakni staf pengajar Program Magister Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL). Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, dan staf Dosen Fakultas Pertanian (FAPERTA), IPB.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldianoverti, L. (2012). Arahana Pengembangan Hutan Rakyat Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Provinsi Jawa Timur. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Attar, M. (2000). Hutan Rakyat: Kontribusi Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani dan Perannya dalam Perekonomian Desa. P3KM Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Chakkar, S. & V. Mousseau. (2007). Spatial Multi Criteria Decision Making. LAMSADE. University of Paris Dauphine. Paris.
- FAO (Food and Agriculture Organization). (1976). A Framework for Land Evaluation. FAO Soils Bull. No. 32. Rome, 72 pp. And ILRI Publication No. 22, Wageningen.
- Darusman, D. & Hardjanto. (2006). Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006*. Bogor.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah. (2010). *Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah 2011-2015*. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah. (2012). *Statistik Kehutanan Tahun 2011*. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2031*. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah.
- Postorino, M.N. & F.G. Pratico. (2012). An Application of Multi-Criteria Decision-Making Analysis to a Regional Multi-Airport System. *Research In Transportation Business & Management*. 4: 44-52.
- Rachman, E., M. Y. Mile, & B. Achmad. (2007). Analisis Jenis-jenis Kayu Potensial untuk Hutan Rakyat di Jawa Barat. *Prosiding Pengembangan Hutan Rakyat Mendukung Kelestarian Produksi Kayu Rakyat*. Balitbanghut. Jakarta.
- Rustiadi, E., S. Saefulhakim, & D. R. Panuju. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Saaty, T. L. (1994). Fundamentals of analytic hierarchy process. RWS Publication. Pittsburgh.
- Sampson, N, & L. DeCoster. (1997). Forest Fragmentation: Implications for Sustainable Private Forests. Published in *Journal of Forestry*. 98(3):4-8.
- Store, R. & J. Jokimaki. (2003). A GIS-Based Multi-Scale Approach to Habitat Suitability Modeling. *Ecological Modelling*. 169: 1–15.
- Zhang, H. (2011). The Evaluation of Tourism Destination Competitiveness by TOPSIS & Information Entropy – A Case in The Yangtze River Delta of China. *Tourism Management* 32(2): 443–45.